## DAFTAR PUSTAKA

- Aguinis, H. 2009. *Performance Management*. 2<sup>nd</sup> ed. Pearson Education Inc. New Jersey.
- Ainsworth, M, N. Smith dan A. Millership. 2007. *Managing Performance Managing People*. Terjemahan T. Supriyanto. Bhuana Ilmu Populer. Jakarta.
- Anggara, S. 2016. *Ilmu Administrasi Negara*. Pustaka Setia. Bandung.
- Bungin, B. 2007. *Penelitian Kualitatif*. 7<sup>th</sup> ed. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Cahyadi, A. 2016. Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Berbasis Good Governance Di Kecamatan Sukolilo Surabaya). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 2(2): 479–494.
- Dwiyanto, A. 2018. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Pres. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2017. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Gadjah Mada University Pres. Yogyakarta.
- Ediyanto. 2020. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik* 2(1): 42–50.
- Firdaus, I. T., M. D. Tursina, dan A. Roziqin. 2021. Transformasi Birokrasi Digital Di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemeritahan Indonesia. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan* 4(2): 226–239.
- Golla, J., A. Rondonuwu, dan J. Kairupan. 2018. Kinerja Pemerintah Kecamatan Dalam Memberikan Pelayanan Publik Di Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1(1): 1–11.
- Halim, A. dan M.S. Kusufi. 2014. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Haryani, H. dan P. Iqrom. 2021. Kinerja Pegawai Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal SIKAP* 5(1): 39–50.

- Heryanto, Y. 2014. Implementasi Good Governance Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Indonesia. *Jurnal Logika* 12(3): 23–40.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 *Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government*. 9 Juni 2003. Jakarta.
- Kantor Kecamatan Candi Sidoarjo. *Https://candi.sidoarjokab.go.id/*. 3 Februari 2022 (18:00).
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 5 Oktober 2020, Jakarta.
- Keputusan Menteri Nomor 25 tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. 24 Februari 2004. Jakarta.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 10 Juli 2003. Jakarta.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, edisi revisi. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. CV Andi Offset. Yogyakarta.
- Maryam, N. S. 2016. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi 6(1).
- Moleong, L. J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Muis, M. A. H., H. A. Saleh, dan A. M. Rusli. 2014. Analisis Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Panakukkang Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 7(2): 73–82.
- Najmi, R. 2018. Kinerja Pegawai Dalam Memberikan Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Anjir Pasar Kab. Barito Kuala. *Jurnal Administrasi Publik* 1(06).
- Nasution, S. R. 2018. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Sail Kota Pekanbaru. *Jurnal Niara* 10(2): 72–77.
- Nazir, M. 1999. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Pemerintahan Tidak Boleh Terganggu. Kompas, 2 Desember 2020, hal. 1 dan 15.

- Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 *Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo*. 10 April 2014. Sidoarjo.
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2014 *Tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo*. 22 Desember 2014. Sidoarjo.
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. 18 September 2017. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal. 16 Oktober 2018. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 18 Oktober 2019. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447. Jakarta.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia *Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik*.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia *Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik*.
- Peraturan Pemerintah No 101 tahun 2000 *Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.* 10 November 2000. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 31 Maret 2020. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91. Jakarta.

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 *Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.* 4 April 2008. Jakarta.
- Rancangan Akhir Rencana Strategi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.
- Rifai, A. A. M. B. Prawiro. 2018. *Metode Penelitian Muamalah*. Salemba Diniyah. Jakarta.
- Rohman, A., S. Y. Hanafi, dan W. T. Hardianto. 2019. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Reformasi* 9(2): 153.
- Saputra, R. D. 2017. Kinerja pegawai dalam pelayanan publik di kantor kecamatan sungai pinang kota samarinda. *EJournal Administrasi Negara*, 5(3): 6342–6355.
- Schewester, R. 2009. Examining the Barriers to e-Government Adoption. *Electronic journal of e-Government* 7(1): 113-122.
- Shafira, A., dan A. Kurniasiwi. 2021. Implementasi E-Government Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Berbasis Online Di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Caraka Prabu* 5(1): 52–68.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta CV Bandung. Bandung.
- Umar, U. 2020. Analisis Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Masyarakat Pada Kantor Camat Padalarang Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Jisipol* 4(1): 101–120.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.29 Desember 2006. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 *Tentang Pelayanan Publik*. 18 Juli 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112. Jakarta.